

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi masalah.....	6
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	7
1.4. Kegunaan Penelitian.....	9
1.5. Kerangka Pemikiran	11
1.6. Metode Penelitian.....	13
1.7. Lokasi Penelitian	15
1.8. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	19
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-unsur Tindak Pidana	20
2.1.2. Pengertian Hukum Pidana Dan Tujuannya	25
2.2. Tinjauan Umum Tentang Retribusi Daerah	26
2.2.1. Pengertian Tentang Retribusi Daerah	26
2.2.2. Pihak Yang Wajib Membayar Retribusi	28
2.3. Tinjauan Umum Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Dan Pemotongan Hewan Ternak	33
2.3.1. Pengertian Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Dan Pemotongan Hewan Ternak.....	33
2.3.2. Ketentuan Retribusi Pemeriksaan Kesehatan dan Pemotongan Hewan Ternak.....	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
3.1. Hasil Penelitian	38

3.1.1. Gambaran Umum Pasar Cikurubuk	
Kota Tasikmalaya	38
3.1.2. Penegakan Hukum Pidana bagi wajib Retribusi Daerah ditinjau dari pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Dan Pemotongan Hewan Ternak Dihubungkan Dengan Kewajiban Pembayaran Retribusi Dipasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya	40
3.1.3. Kendala Hukum Pidana bagi wajib Retribusi Daerah ditinjau dari pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Dan Pemotongan Hewan Ternak Dihubungkan Dengan Kewajiban Pembayaran Retribusi Dipasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya	42
3.1.4. Upaya Hukum Pidana bagi wajib Retribusi Daerah ditinjau dari pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Dan Pemotongan Hewan Ternak Dihubungkan Dengan Kewajiban Pembayaran Retribusi Dipasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya	45
3.2. Pembahasan	48
3.2.1. Penegakan Hukum Pidana bagi wajib Retribusi Daerah ditinjau dari pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Dan Pemotongan Hewan Ternak Dihubungkan Dengan Kewajiban Pembayaran Retribusi Dipasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya	48
3.2.2. Kendala Hukum Pidana bagi wajib Retribusi Daerah ditinjau dari pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Dan Pemotongan Hewan Ternak Dihubungkan Dengan Kewajiban Pembayaran Retribusi Dipasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya	51
3.2.3. Upaya Hukum Pidana bagi wajib Retribusi Daerah ditinjau dari pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Dan Pemotongan Hewan Ternak Dihubungkan Dengan Kewajiban Pembayaran Retribusi Dipasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya	54

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	57
4.1. Kesimpulan	57
4.2. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	
DATA RIWAYAT HIDUP.....	